

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. Z., & Saebani, B. A. (2013). *Pengantar Sistem Sosial Budaya Di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Alifionita, Anggi & Son Haji. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(1), 74-91.
- Andi Lulu Isvany, Syahrudin Nawi, & Sri Lestari Poernomo. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Di Kepolisian Resort Bone. *Journal Of Lex Generalis (Jls)*, 3(3), 518–534.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(4).
- Astuti, Retno Sunu., Warsono, Hardi., & Rachim, A. (2020a). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Universitas Diponegoro Press*, 53(1), 1–8.
- Awi Muliadi Wijaya. (2011, February 11). *Kebutuhan Dasar Anak Untuk Tumbuh Kembang Yang Optimal*. Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/021113-Kebutuhan-Dasar-Anak-Untuk-Tumbuh-Kembang-Yang-Optimal#>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2023). *Kabupaten Bone Dalam Angka 2023*. Bone: Bps Kabupaten Bone.
- Banga, W. (2018). *Kajian Administrasi Publik Kontemporer: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Gava Media.
- Bella Syahputri, F. (2022). Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak. *Jkkp (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 9(02).
- Bone Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya*. (2023, July 23). Pemerintah Kabupaten Bone.
- Danastry, A. G., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaborasi Pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband Di Indonesia. *Jiap*, 7(2), 158–163.
- Dhini, T. M., & Bintari, A. (2023). Perspektif Commitment To Process Pada Collaborative Governance Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 118–136.



(2022). *Administrasi Publik (Teori Dan Pergeseran Paradigma Ke Era Digital)*. In 1.

- Donahue, J. D., Zeckhauser, R. J., & Breyer, S. (2011). Collaborative Governance: Private Roles For Public Goals In Turbulent Times. In *Collaborative Governance: Private Roles For Public Goals In Turbulent Times*.
- Dwiyanto, A. (2017). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi - Agus Dwiyanto - Google Books. In *Ugm Press*.
- Ekasaputra, N. I., & Harsaso, P. (2019). Networking Program Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Surakarta Tahun 2017-2018. *Journal Of Politic And Government*.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 22(1). <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fatmawati, I. (2023, August 14). *Kasus Kekerasan Anak Oleh Oknum Kades, Ppa Turun Tangan*. Lpp Rri.
- Fattah, Amrin. (2023, December 16). *Dua Oknum Guru Sd Di Bone Lakukan Tindakan Asusila Ke Muridnya, Kapolsek S Lue: Sudah Diamankan*. Bonepos.Com.
- Fauziah, A. (2021, June 30). *Bentuk Kekerasan Pada Anak Dan Dampaknya*. Dp3ak Provinsi Jawa Timur.
- Gusmiara, A., A*, D., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaborasi Pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband Di Indonesia. In *Jiap* (Vol. 7, Issue 2).
- Halim, H., Baharuddin, H., & Alam, S. (2020). Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak: Studi Putusan Pengadilan Negeri Polewali. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*.
- Hartono, U. (2019). Kekerasan Dan Perlindungan Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(2).
- Hisrauf, M. (2021). Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Bone. *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 7(2).
- Islamy, L. O. S. (2018). Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi. In *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*.
- Junaidi, & Khoiruman. (2023). Kebijakan Perlindungan Anak. *Jurnal Pusaka*, 13(01). <https://doi.org/10.35897/ps.v13i01.1000>



: T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Isu Edisi 3. In *Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

g, P. R., & Dadang Mashur. (2021). Kolaborasi Antar Aktor Dalam gram Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan. *Jurnal*

Ilmu Administrasi Negara (Juan), 9(1).
<https://doi.org/10.31629/Juan.V9i1.3158>

Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2). <https://doi.org/10.33701/Jipsk.V6i2.1790>.

Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., Yulia Citra, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. Miftah., & Harmianto, S. (2016). Kabupaten Bone Dalam Angka Bone Regency In Figures 2023. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August).

Nugraha, B., Purnamaningsih, P. E., Wismayanti, K. W. D., Martiawan, R., Sumiati, I., Maesarini, I. W., Firdausijah, R. T., & Kunda, A. (2022). *Teori Administrasi*. Pt Global Eksekutif Teknologi.

Oktafien, F. (2020). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019. *Jom Fisip*, 8(3).

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Pratiwi, I. P. (2021). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 By. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 8.

Puspita, Monicha & Rodiyah, Isnaini. (2022). Keterlibatan *Stakeholder* Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Publik*. 8(2), 170-179.

Radit. (2016). *Anak-Anak Di Indonesia*. Unicef Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/anak-anak-di-indonesia>.

Raharja, S. J. (2008). *Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum* [Disertasi]. Universitas Indonesia.



Iriani Fajrianti, Adji Suradji Muhammad, & Edy Akhyari. (2022). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun). *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 1–9. [s://doi.org/10.25299/Jiap.2022.Vol8\(1\).8330](https://doi.org/10.25299/Jiap.2022.Vol8(1).8330)

- Sabaruddin, A. (2015). *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik, Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Graha Ilmu.
- Safroni, L. (2012). Manajemen Dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia. In *Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran*. Aditya Media Publishing.
- Saleh, C., Hendrik, E., Zauhar, S., & Nuh, M. (2021). Collaborative Governance In Public Administration Perspective. *Journal Of Southwest Jiaotong University*, 56(6). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.6.58>.
- Sedarmayanti. (2012). Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik & Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Bagian Ketiga, Edisi Revisi. In *Bandung: Cv. Bandar Maju*. (Vol. 4, Issue 02).
- Setyawan, D. (2019, January 8). *Kpai: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak Abh*. Kpai. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh>
- Shehzad Noorani. (2018). *Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak*. Unicef Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- Simon, H. A. (1950). Administrative Behaviour. *Australian Journal Of Public Administration*, 9(1). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1950.tb01679.x>
- Sinta. (2022). Kolaborasi *Stakeholder* Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Lampung. (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung).
- Siskasari, A. (2021). Sinergitas Pemerintah, Swasta Dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk)*, 1(3). <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.11203>
- Sukmawati, N., Suprastiyo, A., & Rupiarsieh. (2022). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Bojonegoro. *Jian - Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 24–36.
- Sutantio R. Dan Oeripkartawinata, I. (1992), *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Thoha, M. (2010). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta. In *Kencana Prenada Media Group* (Vol. 29, Issue 1).
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside The Black . In *Public Administration Review* (Vol. 66, Issue Suppl. 1). [s://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x](https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x)



Jndang (Uu) No. 1 Tahun 2023 Tentang Pasal 150 Tentang Kitab Undang-ang Hukum Pidana Yang Mencabut Undang-Undang (Uu) Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

W.Creswell, John, J. D. C. (2018). Fifth Edition Research Design: Qualitative,
Quantitative, And Mixed Methods Approaches. Los Angeles, California: Sage
Publications.

Zulkarnaen, Z. (2023). Collaborative Governance: Model Kolaborasi Antar
Stakeholder Dalam Pengelolaan Sungai/Parit Sebagai Batas Alam Kota
Pontianak Dan Kabupaten Kubu Raya. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*,
8(1).



L A M P I R A N



Lampiran 1. Biodata Peneliti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Sepia Gandira
2. Tempat, Tanggal Lahir : Waetuo, 20 Desember 2001
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Sungai Musi, Kelurahan Waetuo, Kab. Bone
5. No.HP : 082335225150
6. Email : Sepiagandira20@gmail.com
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Hude
 - b. : Isa

Riwayat Pendidikan Formal

- 2008-2014 SD Negeri 42 Waetuo
- 2014-2017 SMP Negeri 1 Awangpone
- 2017-2020 SMA Negeri 1 Watampone
- 2020-2024 S1 Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Hasanuddin

Riwayat Organisasi

- Anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (HUMANIS) FISIP UNHAS
- Pengurus Departemen Kemuslimahan Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Mahasiswa Ibnu Khaldun FISIP UNHAS Periode 2021-2022
- Pengurus Divisi Logistik UKM Panahan UNHAS Periode 2022-2023



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kab. Bone



Gambar Wawancara dengan Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kab. Bone



Gambar Wawancara dengan Kepala Unit P2TP2A, Kab. Bone





Gambar Wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Bone



Gambar Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kab. Bone



Gambar Wawancara dengan Ketua Forum Pemerhati Anak Kabupaten Bone





Optimized using
trial version
www.balesio.com

Gambar Wawancara dengan Masyarakat

Lampiran 3. Surat Keterangan Izin Penelitian DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Boulevard No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448838
Website: <http://smap-mmr.sulselprov.go.id> Email: pspp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 32342/S.01/PTSP/2023
Kepada Yth. : Bupati Bone
Lampiran :
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ Hasanudin Makassar Nomor : 9711/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini,

Nama : **SEPIA GANDIRA**
Nomor Pokok : E011201012
Program Studi : Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : J. P. Kemerdekaan Km 10, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul

" COLLABORATIVE PROCESS DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Januari s/d 08 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian,

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya,

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008



di Yth.
Dekan FISIP Univ Hasanudin Makassar di Makassar
tanggal

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BONE**

Alamat : Jalan A.Mappanyukki (Lantai I Gedung Pkk) Kabupaten Bone Sulawesi Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 028/III/DPPPA/2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone menerangkan bahwa :

Nama : SEPIA GANDIRA
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP/Nim/Nomor Pokok : E011201012
Program Study : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makassar

Benar nama tersebut telah melakukan penelitian dari tanggal 16 Januari 2024 s/d 08 Februari 2024, bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dengan Judul "COLLABORATIVE PROCESS DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BONE "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wabone, 08 Maret 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan PA Kab. Bone,

Dra. Hj. ST. ROSNIWATI, M.Si
@19841231 198512 2 030

